BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah bagi hamba-hamba-Nya. Karena dengan perkawinan tersebut Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan dalam berumah tangga. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS. Adz-Dzaariyaat ayat 49 :

﴿٤٩﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Adz-Dzaariyaat:49) ¹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”²

Perkawinan dalam Islam merupakan salah satu ibadah dan salah satu cara yang sah untuk membina rumah tangga. Perkawinan ini mengandung tujuan yang

¹ Departemen Agama. RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang: PT. Tanjung Mas inti, 1992).

² *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia; Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, t.t.), hlm 5.

luhur untuk kebahagiaan bersama seluruh anggota keluarga. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 2 dan 3 yang menyatakan “Perkawinan dalam Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*Mitsaqan Ghollidhan*) untuk mentaati Allah dan melaksankannya merupakan ibadah, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.³

Pernikahan merupakan ikatan yang amat suci, di mana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan diresdai agama, kerabat, dan masyarakat. Dengan pernikahan ini berubahlah kekotoran menjadi kesucian, maksiat menjadi ibadah, dan dosa menjadi amal sholeh.

Akan tetapi dalam melaksanakan kehidupan suami istri ada kemungkinan terjadinya salah paham antara suami istri, salah seorang atau kedua-duanya tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, tidak saling percaya dan sebagainya.⁴

Selain itu terjadinya perbedaan dan pertentangan kemarahan, dan segala yang mengingkari cinta di antara suami istri. Kalau cinta kasih sudah hilang akan berubahlah pilar-pilar perkawinan. Mereka jatuh ke lembah kehidupan yang susah dan pemikiran yang bimbang karena pada dasarnya kesatuan dan kekompakkan dalam segala hal merupakan kunci kesuksesan dan kebahagiaan serta sumber segala kesenangan. Lain halnya kalau ada tabiat yang berbeda dan hati yang tidak

³ Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Direktorat Jendral Agama Islam, 2001) h. 114.

⁴ Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hal 145

bersatu, maka talak (perceraian) akan menghilangkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak.⁵

Pasca lahirnya UU No. 1 Tahun 1974, telah terjadi pergeseran mengenai segi keabsahan suatu perkawinan yang semula diatur oleh Hukum Islam. Perkawinan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 baru dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan hukum agama dan ketentuan hukum negara. Ketentuan hukum agama adalah perkawinan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan. Sedangkan ketentuan hukum negara yang dimaksud adalah bahwa perkawinan harus dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dengan kata lain perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi persyaratan esensial dan persyaratan formil dalam hukum tertulis.

Pelaksanaan akad dilakukan di depan dua orang saksi dengan menggunakan kata-kata ijab wali pihak perempuan melalui walinya atau wakil wali yang sah, dan kabul dari pihak laki-laki. Hal ini berarti dalam melaksanakan akad harus ada dan dihadiri oleh mempelai laki-laki dan perempuan, wali yang sah dari perempuan, dua orang saksi.

Banyak pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di bawah tangan tanpa sepengetahuan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan tidak dicatatkan di KUA dengan berbagai macam penyebab, antara lain disebabkan oleh faktor ekonomi, keagamaan, birokratis, tradisi, dan kasuistis.⁶ Jika pernikahan tidak

⁵ Abd. Rahman, Ghazaly. *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-2, hal 218

⁶ A. Ghofur Anshori, "Praktik Perkawinan di Bawah Tangan dan Peluang Legalisasinya di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Penelitian Fakultas Hukum UGM dengan DEPAG (2003)*, hlm. 7-8

dilakukan di depan petugas PPN dan juga tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah, pernikahan tersebut tetap sah tetapi tidak memiliki kekuatan hukum menurut perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka pernikahan itu dinamakan penikahan (dibawah tangan) karena pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum menurut peraturan yang berlaku. Jadi yang dimaksud dengan perkawinan di bawah tangan di sini adalah sebutan bagi perkawinan yang di lakukan di luar ketentuan hukum Islam versi KHI dan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya, yang tentu saja tidak mendapatkan akta otentik berupa Akta Nikah.

Padahal pencatatan perkawinan itu merupakan suatu upaya yang melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi bagi para perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya bertujuan apabila dalam rumah tangga tersebut terjadi perselisihan atau percekcoakan dan mereka ingin mengajukan perceraian atau salah satu diantara mereka tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing.⁷

Dengan demikian pencatatan perkawinan merupakan salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi, walaupun pencatatan perkawinan ini hanya diatur oleh 1 ayat di dalam UUP, namun sebenarnya pencatatan ini sangat urgen,⁸

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 107

⁸ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 67

sehingga orang yang ingin mengakhiri suatu hubungan atau melakukan perceraian maka salah satu dari kedua belah pihak harus mendaftarkan gugatan tersebut ke pengadilan agama untuk diproses. Adapun perceraian yang dilakukan pasangan yang melakukan pernikahan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), maka pasangan tersebut harus mengajukan permohonan *itsbat* nikah terlebih dahulu untuk membuktikan pernikahannya.⁹ Padahal apabila merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Itsbat nikah berimplikasi memberi jaminan lebih konkret secara hukum atas hak anak dan perempuan jika pasangan suami-istri bercerai. Apalagi di daerah pedesaan, kawin cerai begitu mudah dilakukan, parahnya ketika perceraian itu bukan disampaikan sendiri oleh sang suami, melainkan melalui perantara, yaitu suami menitip pesan cerai kepada sang istri. Tekadang juga suami mengucapkan cerai kepada istrinya melalui telepon. Setelah bercerai, perempuan dengan berbekal harta pribadinya membawa anaknya pulang anaknya kerumah orangtuanya. tidak ada pembagian harta bersama (*gono-gini*) yang didapat karena umumnya harta yang dibagikan tidak ada. Kalaupun ada, istri mau menggugat serta menuntut bagiannya, pengadilan agama sulit memproses, sebab perkawinan

⁹*Ibid.*, hlm 62

mereka tidak diperkuat akta nikah sebagai alat bukti pengadilan untuk memproses dan memutuskan gugatan.

Oleh karena itu, diperlukannya pencatatan perkawinan, bagi yang beragama Islam, namun tak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan Akta Nikah, dapat mengajukan permohonan *itsbat* nikah (penetapan/pengesahan nikah). Kompilasi Hukum Islam (KHI) membuka kesempatan kepada mereka yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan *itsbat* nikah kepada Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya. Pasal 7 ayat (2) KHI mengungkapkan bahwa: Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikah nya ke Pengadilan Agama.

Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesain perceraian;
2. Hilangnya Akta Nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.¹⁰

Masyarakat desa Banua Kepayang hanya sebagian kecil saja yang mengetahui mengenai adanya *itsbat* nikah dan pentingnya *itsbat* nikah tersebut

¹⁰ Pasal 7 ayat (2) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

dalam penyelesaian proses bercerai. Dapat dilihat pada keadaan di masyarakat, dimana masyarakat ada yang mengetahui dan ada juga yang tidak mengetahui proses perceraian tersebut dapat dilakukan di Pengadilan. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Pengetahuan Masyarakat Tentang Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Bagi Pasangan yang Kawin di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Desa Banua Keping Kecamatan Labuan Amas Selatan).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat tentang penyelesaian perkara perceraian di pengadilan bagi pasangan yang kawin di bawah tangan?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan bagi pasangan yang melakukan perceraian di bawah tangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang ingin di capai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang penyelesaian perkara perceraian di pengadilan bagi pasangan yang kawin di bawah tangan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan bagi pasangan yang melakukan perceraian di bawah tangan

D. Signifikasi penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian diatas diharapkan dari hasil ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah ilmu pengetahuan dibidang Hukum Keluarga, dalam bentuk karya ilmiah dan sumbangan untuk memperkaya kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bahan aspek teoritis (keilmuan) wawasan dan pengetahuan seputar masalah yang diteliti, baik bagi penulis, maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang di ketahui berkenaan dengan hal¹¹ atau segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu, termasuk di dalamnya ilmu, seni dan agama¹², pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernyataan tahu atau tidak tahu dari lima orang yang melakukan perceraian di bawah tangan terkait dengan

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 3-Cet. 1.* (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), hlm. 1121

¹² Jujun S. Suriasumantri. *Filsafat ilmu sebuah pengantar populer.* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 104

adanya penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama bagi pasangan yang melakukan pernikahan di bawah tangan.

2. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama¹³. Dalam skripsi ini masyarakat desa Banua Kepayang kecamatan Labuan Amas Selatan dengan mengambil studi kasus lima orang yang telah melakukan perceraian di bawah tangan.
3. Kawin di bawah tangan adalah perkawinan yang belum atau tidak tercatat di KUA/PPN Kecamatan atau pernikahan yang dilakukan secara sembunyi (siir), tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam. Di bawah tangan tidak secara resmi¹⁴, dalam skripsi ini juga membahas istilah perceraian di bawah tangan.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis diantaranya :

1. Skripsi yang disusun oleh Faridah Nim: 104044201464 tahun 2008 dari Jurusan Ahwal Al-Syakhsiiyah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *Penyelesaian Cerai Gugat Tanpa Akta Nikah (Analisis Putusan Nomor*

¹³ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 3-Cet. 3.* (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 3-Cet. 3.* (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm.

28/PDT.G/2007/PA.Cibinong). inti dari penelitian ini adalah untuk menganalisis salah satu Putusan yang ada di PA Cibinong).¹⁵

2. Skripsi yang disusun oleh Ika Yuni Astuti Nim: 09401241023 tahun 2014 dari Jurusan Pendidikan kewarganegaraan dan hukum, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Wates. inti dari skripsi ini adalah ingin mengetahui apa alasan-alasan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Wates dan bagaimana pelaksanaannya.¹⁶

Dari dua penelitian diatas, peneliti menemukan penelitian yang mengkaji tentang penyelesaian perkara untuk bercerai, namun keduanya memiliki kekhususan masing-masing adapun skripsi yang pertama itu terkhusus ke sebuah putusan yang ada di Pengadilan Agama sedangkan skripsi yang kedua itu terkhusus untuk mengetahui alasan mengapa banyaknya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Wates dan juga ingin mengetahui bagaimana pelaksanaannya. Berbeda halnya dengan apa yang hendak penulis teliti, yang penulis akan teliti yaitu bagaimana pengetahuan masyarakat itu mengenai masalah penyelesaian perkara perceraian dibawah tangan dan juga faktor penyebabnya. Jadi disini penulis bakal melakukan wawancara yang di mana masyarakat sendiri yang bakal menjawab langsung.

¹⁵ Faridah, "Penyelesaian Cerai Gugat Tanpa Akta Nikah (Analisis Putusan Nomor 28/PDT.G/2007/PA.Cibinong)," *skripsi* tidak di terbitkan Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2007).

¹⁶ Ika Yuni Astuti, "Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Wates," *skripsi* tidak di terbitkan di Fakultas ilmu sosial UIN Yogyakarta (2014).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam bab yang tersusun secara sistematis. Tiap-tiap memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan kesatuan yang saling berhubungan secara sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, sistematika penelitian, jenis, sifat dan Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber data, Teknik Pengumpulan data, Teknik Pengolahan dan Analisis Data, dan Prosedur Penelitian.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini akan di bahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian yaitu jenis dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis yaitu laporan hasil penelitian, meliputi dari penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, merupakan bab penutup dimana peneliti memberikan kesimpulan dan memberikan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis pembahasan.